

PERBANDINGAN REKRUTMEN PARTAI POLITIK TERHADAP CABUP DAN CAWABUP PILKADA KABUPATEN JEMBER 2015

COMPARISON OF POLITICAL PARTIES RECRUITMENT FOR ELECTIONS OF REGIONAL HEADS IN JEMBER 2015

Sugeng Nur Fitrah Yunifar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: soegengnoer@gmail.com

Diuji: 27 Februari 2017; direvisi: 28 Februari; disetujui: 1 April 2017

Abstract

This Journal discusses the recruitment pattern of political parties, focusing on the major parties and ideological differences have often won the elections on general elections writers drawn to the regional head election. Why is this so interesting is because the author's perspective when seen from the political forces, bases strong political and expansion of political voice, the region contributed greatly to the continuity of the political party itself. Many seeds politicians menasional come from the real example is the politicians Joko Widodo of regional heads solo until the head capital region to become president of Indonesia it all stems from political activity area, the political party which has the function of political recruitment has a major role in causing the political figures of national , Moreover the colorful platform political purposes, the authors tried to describe the political parties of their recruitment comparison cabup and cawabup on the elections, Jember, 2015.

Keyword: Elections, Recruitment Politic, Political Parties

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai pola rekrutmen partai politik, berfokus pada partai besar dan mempunyai perbedaan ideologis yang sering memenangkan pemilihan umum, tentang pemilihan umum penulis tertuju kepada pemilihan umum kepala daerah. Mengapa demikian dikarenakan menarik sudut pandang penulis apabila kekuatan politik dilihat dari daerah, basis-basis politik yang kuat dan perluasan suara politik, daerah memberikan andil besar dalam keberlangsungan partai politik itu sendiri. Banyak bibit politisi yang menasional berasal dari daerah contoh nyatanya adalah proses politisi Jokowi dari kepala daerah solo sampai kepala daerah ibu kota sampai menjadi presiden Indonesia itu semua berasal dari kegiatan politik daerah, partai politik yang memiliki fungsi rekrutmen politik memiliki peran besar dalam menimbulkan figur politisi nasional. Apalagi mengenai warna warni platform tujuan politik, maka penulis mencoba mendeskripsikan tentang perbandingan rekrutmen partai politik terhadap cabup dan cawabup pada pilkada jember 2015.

Kata Kunci: Pilkada, Partai Politik, Rekrutmen Politik.

Pendahuluan

Pemilu merupakan suatu proses para memilih orang-orang berkompeten untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, yang dimana jabatan tersebut beraneka-ragam mulai dari pemilihan eksekutif dan kepala daerah serta legislatif. Pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakil wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Diperkuat oleh teori dari (Gaffar, 2002 : 9) mengatakan bahwa dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk berpendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk menikmati pers yang bebas.

Pemilihan kepala Daerah secara langsung selanjutnya diwujudkan dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Undang Undang, Nomor 32 tahun 2004, Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut dilakukan oleh rakyat secara langsung, mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang per-syaratannya dan tata tata caranya ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mempunyai sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu. Partai politik telah di sahkan pada 15 Januari 2011 pemerintah mengesahkan UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.2 tahun 2008, itu artinya memperkuat partai politik sebagai bagian dari kesatuan sistem politik di Indonesia dan setiap aktifitas politik di Indonesia tak luput kepartaian berkecimpung di dalamnya. Sedikit menjelaskan kembali pada referensi berbeda mengenai definisi partai politik (Septiadi dan Kolip, 2013 : 277) partai politik merupakan sekelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang disatukan dan didorong oleh suatu ideologi tertentu, yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan lewat pemilihan umum guna melaksanakan kebijaksanaan umum yang mereka susun ". Dalam arena pemilihan umum, partai politik

memegang peranan penting dalam mempersiapkan pemimpin-pemimpinnya, dalam hal ini partai politik menjadi sarana bagi lahirnya calon-calon pemimpin yang diharapkan memiliki integritas, kompetensi, serta memiliki kecakapan dalam memimpin suatu wilayah. Selain itu partai juga ada dalam setiap dinamika politik lokal, dimana proses rekrutmen kepala daerah juga ditentukan oleh partai politik. Dari pemaparan tersebut rekrutmen politik menjadi penting untuk di kaji dalam studi ilmu politik. Rekrutmen partai politik menurut pemaparan referensi dari (Budiardjo, 2015 : 408) "fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena dengan adanya kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.". Pada pernyataan diatas rekrutmen politik merupakan peranan partai politik yang berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas pada kepentingan internalnya partai butuh kader-kader yang berkualitas, dengan memiliki kader berkualitas bagi partai tersebut akan memiliki kesempatan perkembangan partai untuk keberlangsungan partai tersebut, dan lagi jika partai tersebut memiliki kader-kader yang berkualitas, maka partai tidak akan sulit untuk menentukan pemimpinnya, yang nantinya masuk dalam bursa calon kepemimpinan nasional. Apabila kekuasaan untuk memerintah diperoleh partai, maka partai berperan pula sebagai pembuat keputusan politik. Eksistensi pada partai politik merupakan suatu tanda bahwa partai harus berlomba-lomba menampilkan politisi-politisi terbaiknya hal tersebut akan sangat bergantung sekali pada fungsi rekrutmen ini. Perkembangan politik di daerah saat ini mengalami perubahan kemajuan yang luar biasa sejak diputuskannya otonomi daerah. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sesuai peraturan Undang-undang yang dibuat saat era reformasi. Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 keadaan semakin kompetitif dan berpeluang terbuka, rakyat juga sudah semakin cerdas dan semakin mempertanyakan kinerja kepala daerah yang terdahulu sehingga mereka bersifat objektif, sikap partai politik semakin terbuka, pragmatisme dari

partai politik ditandai dengan banyaknya figur calon yang bukan dari kader partai turut mencalonkan agar diukung oleh partai. Hal tersebut juga sebagai kesempatan untuk partai memperluas basis pemilih serta melihat peluang menang. Dinamika politik memang selalu membuat persepsi masyarakat tentang partai politik tingkat kepercayaannya naik turun. Pada pilkada sebelumnya memang partai bersikap tertutup. Dengan menghadirkan kader-kader terbaiknya yang ditempa melalui pendidikan politik dalam partai. Saat ini partai yang sangat terbuka pada kriteria-kriteria calon kepala daerah memperbolehkan orang non partai atau bukan kader untuk mengajukan diri untuk diukung partai.

PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang besar dan juga memiliki tokoh-tokoh yang sudah atau sedang menduduki jabatan di daerah. Dalam proses rekrutmen partai politik juga memiliki kelemahan dan keunggulan, keunggulan PDI-Perjuangan biasanya lebih mengutamakan kader-kadernya yang berpengalaman untuk maju menjadi calon kepala daerah, contohnya pada pilkada di Jakarta yang dimenangkan Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, selain itu ada gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga merupakan kader dari PDI-Perjuangan. PDI-Perjuangan yang identik dengan semboyan mengutamakan kepentingan rakyat kecil

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap cabup dan cawabup pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Jember ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pola rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap calon Bupati dan Wakilnya pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Jember.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

serta ideologi Nasionalisnya yang kuat itu pasti tercermin pada setiap kader-kadernya. Hal tersebut hampir sama yang dilakukan pada Partai Keadilan Sejahtera mereka juga mengajukan calon dari dalam internal partai, kader-kader yang berkualitasnya ditampilkan. Partai Keadilan Sejahtera memiliki pola yang unik dalam rekrutmen kaderisasinya, kader Partai Keadilan Sejahtera dipilih dan diajukan tidak dengan mengajukan diri tetapi diajukan oleh guru pembimbing menggunakan metode Tarbiyah keislaman. Salah satu kepala daerah yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Kedua partai tersebut amat kuat menguasai kancah politik di daerah. Dengan ciri khas serta ideologis yang identik dari kedua partai tersebut, maka mereka memiliki masa yang besar di daerah. Melihat dari proses rekrutmen kedua partai tersebut yang menggunakan proses rekrutmen tertutup yang artinya hanya internal partai yang mengetahui proses tersebut.

Berdasarkan permasalahan dari latarbelakang diatas, khususnya menyangkut tentang rekrutmen politik, maka menulis akan membahas mengenai perbandingan dari salah satu fungsi dari partai politik dengan judul : *PERBANDINGAN REKRUTMEN PARTAI POLITIK TERHADAP CABUP DAN CAWABUP PILKADA DI KABUPATENJEMBER.*

- ✓ Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai perbandingan proses rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap cabup dan cawabup pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Jember.

Manfaat Praktis

- ✓ Sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa.

Partai Politik

Asal-usul partai politik menurut Ramlan Subakti dalam Setiadi dan Kolip (2013:278) ada tiga teori:

1. Teori kelembagaan yang melihat adanya saling hubungan antara parlemen awal dengan timbulnya partai politik. Dalam teori ini dikemukakan bahwa partai politik timbul karena adanya kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontak dan membina dukungan dari anggota masyarakat. Artinya, dengan membentuk

organisasi politik setempat, maka para anggota parlemen itu akan dapat dengan mudah mengadakan kontak dan sekaligus memudahkan pembinaan dukungan kepadanya. Jadi, partai politik pertama kali dibentuk oleh kalangan lembaga legislatif dan eksekutif. Setelah itu baru muncul partai politik lain yang dibentuk oleh kalangan luar kedua badan tersebut sebagai usaha menandingi partai yang dibentuk oleh kalangan badan legislatif dan eksekutif. Partai dari kalangan luar kedua badan tersebut dibentuk atas kesadaran politik sekelompok kecil orang yang memiliki aspirasi dan cita-cita politik yang sama, yang penuh kesadaran pula ingin menggunakan partai sebagai sarana mencapai tujuan politiknya, partai seperti ini dapat ditemui dalam wilayah atau bangsa yang tengah mengalami penjajahan yang menggunakan partai untuk mencapai kemerdekaannya. Akan tetapi, ini juga dapat ditemui di negara maju seperti partai buruh di Inggris dan Australia.

2. Teori situasi-historis yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik menghadapi krisis situasi sejarah dan tugas-tugas. Teori pembangunan yang melihat munculnya partai politik sebagai akibat dari modernisasi dan pembangunan dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Krisis situasi-historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami perkembangandari bentuk tradisional ke bentuk modern. Pada masa seperti ini terjadi berbagai perubahan, seperti inflasi, depresi, gerakan-gerakan populis, pertambahan penduduk, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, kemajuan komunikasi dan media masa, dan mobilitas penduduk peningkatan aspirasi. Krisis situasi-historis ini menimbulkan tiga masalah besar yaitu: (1) legitimasi; (2) integrasi; (3) partisipasi. Artinya, perubahan-perubahan tadimenimbulkan masalah keabsahan rezim yang berkuasa atau dukungan dari khalayak kepada rezim yang ada menimbulkan masalah tuntutan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam proses politik. Untuk menjawab ketiga proses inilah, partai politik dibentuk. Partai politik yang mempunyai akar dalam masyarakat diharapkan akan mengendalikan pemerintahan sehingga terbentuk pola hubungan kewenangan antara pemerintah dan rakyat. Partai politik yang beranggotakan unsur nasional itu diharapkan berperan sebagai pengintegrasikan bangsa. Dan

partai politik diharapkan berperan sebagai saluran keikutsertaan anggota masyarakat dalam proses politik.

Dalam teori ini dikemukakan bahwa modernisasi di segala bidang kehidupan, seperti sekularisasi pendidikan, urbanisasi, industrialisasi, kemajuan transportasi, komunikasi dan media masa, meluasnya kekuasaan negara, meningkatkannya kekuatan individu untuk mempengaruhi lingkungan, dan munculnya organisasi-organisasi profesi dan kepentingan-kepentingan, akan menimbulkan keinginan dan tuntutan individu dan kelompok masyarakat untuk membentuk organisasi politik untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Singkat kata, modernisasi dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi akan menimbulkan tuntutan akan adanya partai politik.

Partai politik itu tidak sekedar mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan dan melakukan kegiatan untuk menarik dukungan dari para pemilih dalam pemilihan umum atau cara lain untuk mendapatkan dukungan umum.

Menurut Setiadi dan Kolip (2013 : 280) ciri partai politik yaitu:

1. Berakar dalam masyarakat lokal.
2. Melakukan kegiatan secara terus-menerus.
3. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah.
4. Ikut sebagai konstituen atau peserta dalam pemilihan umum.

Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah.

Rekrutmen Politik

Menurut Setiadi dan Kolip (2013 : 282) menjelaskan rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok aktor politik untuk menduduki dan menjalankan peranan politik tertentu baik dalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan, seperti untuk menjadi anggota DPRD/DPR, menteri, direktur jenderal, gubernur, rektor, dekan, bupati, kepala desa, pimpinan partai, dan pimpinan kelompok-kelompok kepentingan. Partai politik mempunyai salah satu fungsi untuk menyeleksi dan memilih atau mengangkat seseorang atau beberapa orang

anggotanya atau anggota masyarakat lainnya untuk menduduki dan melaksanakan peranan politik tertentu dalam pemerintah atau diluar pemerintahan. Fungsi ini akan semakin besar kalau partai yang bersangkutan merupakan partai yang mempunyai wakil-wakil yang mayoritas di parlemen baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Melihat dari pendapat yang dijelaskan diatas, dalam rekrutmen politik pada hakekatnya dapat diartikan sebagai seleksi terhadap individu ataupun sekelompok orang dalam penempatan jabatan politik dalam suatu negara. Fungsi rekrutmen implementasinya oleh partai politik disesuaikan dengan mekanisme masing-masing partai. Rekrutmen merupakan fungsi yang sangat vital bagi partai politik. Hal tersebut dikarenakan jika partai politik gagal melaksanakan fungsi rekrutmnya, maka keberlangsungan atau eksistensi partai terancam.

Menurut Budiardjo (2015 : 408) fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Pola Rekrutmen Politik

Menurut Haris (2005 : 8), rekrutmen oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahapan yaitu:

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elit partai tingkat lokal atau ranting partai dengan elit partai di tingkat atasnya atau anak cabang.

2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijarah. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elit tingkat cabang daerah.
3. Penetapan calon. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon.

Norris (Pamungkas, 2011 : 93) mengungkapkan terdapat 4 hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik.

1. Kandidat yang dapat dinominasikan Partai politik memberikan sejumlah persyaratan tambahan diluar yang ditentukan negara. Regulasi negara biasanya meletakkan persyaratanpersyaratan dasar bagi individu yang boleh menominasikan diri, diantaranya adalah persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan dan sebagainya.
2. Penyeleksi Penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat. Yang disebut lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih.
3. Tempat seleksi Hazan (Pamungkas, 2011 : 98) menyebutnya sebagai persoalan desentralisasi. Secara ringkas ia menyatakan bahwa ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya seperti representasi teritorial atau fungsional, metode ini disebut sentralistik.

4. Kandidat yang dinominasikan Rahat dan Hazan (Pamungkas, 2011 : 99) menyebutkan dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan vs model penunjukkan. Dalam system pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem penunjukan yang murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara itu dalam sistem penunjukkan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan.

Menurut Norris dan Lovenduski (Pamungkas, 2011 : 98), agen pembuat keputusan dalam rekrutmen politik terbagi menjadi dua dimensi yaitu :

1. Dimensi bagaimana kekuasaan disebar, yaitu apabila kekuasaan tersentralisasi dipusat, regional atau lokal.
2. Bagaimana formalisasi keputusan dibuat, apakah dibuat secara formal atau informal. Pembagian agen pembuat keputusan terbagi lagi menjadi beberapa model yaitu :
 - (1) Informal-terpusat, model ini mekanismenya kemungkinan konstitusional tetapi dalam prakteknya dikarakteristikan sebagai patronase kepemimpinan. Anggota partai memainkan peran sangat terbatas dalam proses. Artinya sekedar melayani fungsi simbolik.
 - (2) Informal-ragional, pada model ini faksi pemimpin tawar-menawar dengan masing-masing yang lain untuk menempatkan kandidat atau calon favorit diposisi terbaik.
 - (3) Informal-terlokal, pada model ini penguasa lokal memutuskan prosedur umum yang

digunakan untuk rekrutmen politik. Tanpa panduan yang mapan, sangat mungkin berubah-ubah. Sehingga rawan dimanipulasi oleh kelompok-kelompok kecil.

(4) Formal-terpusat, yaitu eksekutif partai pusat memiliki otoritas konstitusional untuk memutuskan calon dan pemimpinnya.

(5) Formal-ragional, pada model ini sama seperti formal terpusat dimana eksekutif regional memiliki otoritas konstitusional untuk memutuskan calon.

(6) Formal-terlokal, pada model ini antara konstitusional dan panduan nasional dimampukan untuk menstabilkan proses rekrutmen. Sistem ini memungkinkan proses yang transparan dan aturan yang adil.

Pilkada

Seiring dengan adanya perubahan UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004, sejak 1 Juni 2004 kepala daerah di Indonesia telah dipilih secara langsung. Perubahan demikian selain dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan rakyat dalam proses pemilihan kepala daerah juga dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh para wakil rakyat. Melalui proses pemilihan secara langsung akan muncul para kepala daerah yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat. Pertanggungjawaban kepala daerah akan lebih banyak dilakukan kepada rakyat. Pertanggungjawaban kepada lebagaperwakilan rakyat di daerah lebih banyak berfungsi sebagai mekanisme kontrol kelembagaan. Marijan (2010 : 154)

Menurut Thubarry (2005 : 7) pilkada dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk membentuk wadah integritas bersama dalam membangun daerah. Pilkada dapat dijadikan sebagai sebuah konsensus bersama antara calon kepala daerah dan masyarakat untuk memperbaiki berbagai ketimpangan dan

problem-problem yang menghambat kemajuan daerah. Walhasil momentum pilkada bisa dijadikan medium kontrak politik antara masyarakat pemilih dan calon kepala daerah supaya jika ia terpilih nanti tidak mengingkari janji-janji politik yang telah disepakati.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif sedangkan jenis penelitian berdasarkan tempatnya menggunakan penelitian lapangan (Field Research). Tujuan penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang rekrutmen kepala daerah misalnya fungsi partai, mekanisme rekrutmen politik, sampai pada pemilihan kepala daerah. Menggunakan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Irawan (2006 : 3) penelitian kualitatif disebut *verstehen* (pemahaman mendalam) karena mempertanyakan makna suatu objek secara mendalam dan tuntas. Penelitian kualitatif disebut *Participant-Observation* karena peneliti itu sendiri yang harus menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data dengan cara mengobservasi langsung objek yang ditelitinya. Jadi sebenarnya makna penelitian kualitatif itu tidak terbatas pada urusan data, objek kajian, atau bahkan prosedur penelitian. Makna penelitian kualitatif sungguh tidak mudah didefinisikan, tetapi bisa dipahami ciri-ciri khasnya. Satu ciri khasnya yang sangat penting adalah makna “kebenaran” menurut penelitian kualitatif

Sumber dan Jenis Data

Pertama, diidentifikasi anggota PDIP dan PKS Jember yang dianggap dapat memberi informasi untuk diwawancarai (informan), kemudian orang ini juga dijadikan sebagai informan untuk mengidentifikasi anggota DPC PDIP dan DPTD PKS sebagai informan yang dianggap dapat memberi informasi. Demikian proses ini berlangsung hingga terpenuhi jumlah informan yang dikehendaki, sampai

mendapatkan informasi yang lengkap tentang mekanisme rekrutmen calon Kepala Daerah Kabupaten Jember di DPC PDIP dan DPTD PKS Jember 3 Informan diidentifikasi berdasarkan klasifikasi sebagai berikut: politisi PDIP dan PKS, orang yang ada di struktur DPC PDIP dan DPTD PKS Kabupaten Jember.

Sumber sekunder adalah data penunjang sumber utama untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal, artikel, koran online, browsing data internet, dan berbagai dokumentasi pribadi maupun resmi yang membahas mengenai rekrutmen politik.

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Jember, khususnya di DPC PDI-Perjuangan dan DPTD PKS Jember. Pemilihan setting didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain Jember yang dipimpin oleh Bupati ini merupakan daerah terbesar ke tiga di Provinsi Jawa Timur . Kabupaten Jember juga menjadi barometer perpolitikan di Jawa Timur. Yang juga menarik adalah partai PDIP dan PKS merupakan partai yang kuat, memiliki basis masa yang besar di jember selalu memenangkan jabatan-jabatan politik kadernya. Pertimbangan kedua memilih Jember sebagai setting penelitian adalah pertimbangan efisiensi waktu dan biaya yang terjangkau oleh peneliti.

Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka dipergunakan teknik informan. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan-pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan kunci (key informan) dan informan biasa. Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan biasa adalah informan yang

ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan saja.

Unit analisa adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu peristiwa sosial misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah: Struktur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera baik di level PAC, DPC, dan DPD. Khususnya untuk informan dari struktural DPC PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Jember, peneliti mengambil informan dari struktural periode 2005-2010 dan periode 2010-2015.

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian kualitatif ini dengan menggunakan metode observasi, interview dan kajian kepustakaan.

a) Metode Observasi

Kartono (1990 : 157) Observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. James P. Chaplin dalam (Kertono, 1990 : 157) menjelaskan observasi ialah pengujian secara intensional atau bertujuan sesuatu hal, khususnya untuk maksud pengumpulan data. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data tentang mekanisme rekrutmen politik DPC PDI-Perjuangan dan kondisi sosial politik yang bisa mempengaruhi penetapan calon Bupati Jember dari PDIP dan PKS sebagai partai pendukung maupun kondisi politik pasca terpilih sebagai Kepala Daerah. Yang menjadi sumber data adalah hubungan kedua elit politik ini dari tahun 2010-2015 ini.

b) interview

Hadi (2002 : 63) interview sebagai suatu proses tanya-jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya, tampaknya merupakan alat

pengumpulan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpendam (latent) maupun yang memanifest. Dalam penelitian ini fungsi interview digunakan sebagai langkah untuk mengidentifikasi anggota dan kader partai non structural dengan metode snow ball sampling sampai mengarahkan pada anggota struktural DPC PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Jember atau yang menjadi kunci dalam penetapan calon Bupati Jember dari PDIP dan PKS. Materi yang digali dalam in-depth interview berisi tentang dinamika politik internal DPC PDIP dan PKS Jember, proses rekrutmen calon kepala daerah kabupaten Jember, dan penetapan calon Kepala Daerah kabupaten Jember oleh PDIP dan PKS.

c) Kajian kepustakaan

Pada bagian ini, kita akan memahami metode analisis yang berhubungan langsung dengan metode kepustakaan, yaitu analisis isi (*Content analysis*) content analisis adalah satu teknik analisis terhadap berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak (buku, artikel, novel, koran, majalah dan sebagainya) dan bahan noncetak, seperti musik, gambar, benda-benda Irawan (2006 : 60). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa dokumen yang mendukung penelitian rekrutmen politik DPC PDIP dan PKS Jember dalam menentukan Calon Bupati yang diusungnya. Dokumen itu berupa AD/ART Partai, Surat Penetapan calon Kepala Daerah dari DPP PDIP dan PKS, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

Secara keseluruhan teknik analisis data yang digunakan condong kepada content analisis. Berikut ini adalah prosedur content analisis yang dijelaskan secara singkat menurut Irawan (2006 : 61)

1. Menentukan Tujuan Analisis

Dalam hal ini peneliti mengidentifikasi tujuan analisisnya dengan cara menurunkannya dari fokus penelitian. Tujuan ini misalnya untuk: mengumpulkan informasi deskriptif, menganalisa hasil-hasil dari berbagai penelitian dengan tema yang sama.

2. Mengumpulkan Data

Peneliti mulai membaca, mengkaji, dan mencatat data-data yang diambil dari berbagai sumber. Karena jumlah sumber data amat banyak dan jumlah data juga sangat banyak, peneliti perlu membuat sistem pencatatan yang rapi dan sistematis.

3. Mengidentifikasi bukti-bukti kontekstual

Dalam hal ini, peneliti mulai mencari hubungan antara data dengan realitas yang sedang ditelitinya. Dia menghubungkan data “netral” dari kajian sumber keputastakaanya dengan dunia “nyata” yang sedang ia kaji.

4. Mereduksi data

Peneliti mulai melakukan sortir terhadap data yang dikumpulkannya, mana yang digunakan dan mana yang tidak digunakan.

5. Memberi kode pada data

langkah ini bersifat sangat rinci dan detail. Peneliti mulai membaca semua datanya dan memberi kode-kode sesuai dengan topiknya.

6. Menganalisis dan menafsirkan data

Peneliti mulai menganalisis datanya, menafsirkan, mentriangulasi dengan sumber-sumber lain, mengambil kesimpulan. Proses ini berlangsung berulang-ulang sampai tercapai “kejenuhan” (*saturated*) data.

Hasil dan Pembahasan

Pola rekrutmen PDI-Perjuangan pada kegiatan pilkada di Kabupaten Jember tahun 2015, ada mekanisme yang merupakan tahap-tahap yang digunakan partai. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai tahap-tahap rekrutmen partai pada pilkada Kabupaten Jember 2015.

Pertama yang dilakukan DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Jember pada Pilkada 2015 adalah partai PDI-Perjuangan membuka pendaftaran dan masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati mendaftarkan

diri untuk dicalonkan oleh partai PDI-Perjuangan. Dari sekian calon yang mendaftar selanjutnya di verifikasi yang sesuai dengan visi dan misi PDI-Perjuangan menurut Bapak Edi Cahyo Purnomo selaku wakabid bidang Organisasi. Kegiatan tersebut dilakukan pada tahun 2014, pertama kali dibukanya pendaftaran yang mendaftar antara lain Abdul Cholik Asyari (dosen Unoversitas Jember), Dwi Setyo Nusantara (birokrat Pemerintah Kabupaten Jember), Bagong Sutrisnadi (Wakil bupati Jember periode 2000-2005), Arifin (Rektor Ikip PGRI), Haryanto (mantan kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab.Jember), serta Sulisno (pengusaha), Faida (direktur RS Bina Sehat). Selanjutnya dilakukan Rakercabsus, dari situ cabup dan cawabup melakukan presentasinya mengenai visi misi dilakukanlah pleno menurut bapak Bambang Wahyoe selaku sekertaris DPC PDI-Perjuangan Jember ada 19 anggota DPC PDI-Perjuangan yang menentukan siapa calon yang akan dibawa oleh partai, akhirnya dari calon-calon tersebut dimenangkan oleh Faida-Muqit sebagai calon yang dibawa oleh partai PDI-Perjuangan.

DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Jember membuka pendaftaran untuk cabup dan cawabup Kabupaten Jember, berkas administrasi lamaran yang masuk kemudian diseleksi oleh tim pemenang pemilu yang dibentuk ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Jember. Tim bertugas menyeleksi kelengkapan administrasi berkas dari pendaftar cabup dan cawabup, setelah lulus berkas setelah lulus melakukan tes selanjutnya, berikut wawancara penulis dengan salah satu tim pemenang pemilu yang juga merupakan sekertaris DPC PDI-Perjuangan Jember Bapak Bambang Wahyoe:

“pertama yang dilakukan tim pemenang pemilu adalah membuka pendaftaran bagi siapa saja masyarakat jember yang mempunyai kemampuan, syarat-syarat yang dikuatkan undang-undang, syarat-syarat yang dikeluarkan DPC-PDI-Perjuangan Jember.”

Seleksi pada tahap 1 merupakan seleksi persyaratan administrasi pengumpulan berkas-berkas yang harus dilengkapi melalui peraturan yang ada

dalam undang-undang. Tahap awal ini merupakan prosedur yang akan menggambarkan kelayakan calon Bupati dan Wakil Bupati melalui verifikasi dilihat dari riwayatnya pendidikan serta bebas dari masalah hukum, kesehatan.

Tahap ini cabup dan cawagub akan melewati serangkaian tes dengan tim penguji yang berasal dari anggota DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Jember. Penilaian yang diterapkan adalah yang sesuai dengan standar DPP partai PDI-Perjuangan. Standar PDI-Perjuangan yang terkait dengan visi misi partai tersebut serta idelogis dari partai. Maka cabup yang akan diusung partai melakukan presentasi di depan anggota DPC. Setelah proses-proses tersebut selesai, dari cabup yang mendaftarkan diri langsung diajukan kepada keputusan DPP. Seperti yang dikutip pada wawancara dengan wakabid organisasi DPC PDI-Perjuangan: *“seleksi tahap 2 adalah tahap akhir atau tahap pemantapan, dalam tahapan ini, tim menyaring dari awal ada 7 nama cabup yang mendaftar melewati tahap 1 dan tahap akhir ini sehingga dikerucutkan menjadi 3 nama pasangan calon yang akan diajukan pada DPP, tentunya melewati tes profile peserta dan Tanya jawab yang dihadiri anggota dari PAC sampai DPC PDI-Perjuangan, peserta menyampaikan program-program yang akan dikonsentrasikan.”*

Hasil wawancara diatas menjelaskan seleksi tahap terakhir yang dilakukan DPC PDI-Perjuangan Jember selanjutnya keputusan ditentukan oleh DPP, disini terlihat partai terbuka dalam melakukan penyeleksian dari proses administrasi sampai tes wawancara cabup dalam menyampaikan konsennya untuk Kabupaten Jember. DPC PDI-Perjuangan sangat kolektif kolegial dengan menghadirkan anggota PAC dan DPC keanggotan PDI-Perjuangan di Jember, untuk menyaksikan calon menyampaikan profilnya yang akan diusung partai tersebut layak atau tidak.

Seleksi tahap kedua ini menurut penulis, PDI-Perjuangan terbuka bagi seluruh calon yang akan mendaftar, tetapi partai mempunyai mekanisme proses-proses dimana digunakan untuk mendapatkan

kriteria yang pas bagi partai untuk diajukan ke dalam PILKADA 2015 Kabupaten Jember.

Pola rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Jember juga ada beberapa tahapan, mulai dari pendekatan-pendekatan pada kader-kader eksternal dan internal untuk diusung menjadi cabup dan cawabupnya hingga pada tahap pendaftaran cabup cawabup kepada KPU Kabupaten Jember.

Seperti yang dijelaskan ketua DPW PKS Kabupaten Jember bapak Rusdam, Pada Partai Keadilan Sejahtera sendiri membentuk TPPD tim pemenang pemilu daerah. Salah satu tugasnya adalah mencari kader-kader internal atau kader eksternal yang bisa diusung untuk menjadi calon Bupati. Tim pemenang pemilu daerah Partai Keadilan Sejahtera melakukan pendekatan kepada kader eksternal dan internal untuk komunikasi. Dari kegiatan tersebut juga dilakukan poling pada anggota internal Partai Keadilan Sejahtera.

Ada pendekatan-pendekatan dalam tim pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dibentuk oleh DPW Partai Keadilan Sejahtera Jember. Pendekatan itu ditujukan pada sasaran kader internal maupun eksternal. Setelah dikumpulkannya nama calon-calon yang sudah terdaftar dari pendekatan tersebut, dilakukannya poling dalam internal Partai Keadilan Sejahtera Jember. Pada partai keadilan sejahtera seleksi dibagi pada dua tahap menurut bapak Rusdam ketua DPW Jember dikutip dari wawancara sebagai berikut:

“dalam kegiatan penentuan nama-nama calon dan wakil Bupati Kabupaten Jember 2015 kemarin kita membentuk tim pemenang pemilu, dari situ ada 2 tahap, diantaranya seleksi tahap internal dan seleksi tahap internal. Pertama-tama dalam internal merupakan tim, dari setiap 1 orang tim ditugaskan melakukan pendekatan-pendekatan yang intensif pada cabup cawabup baik dari kalangan internal maupun eksternal. Kegiatan tersebut digunakan agar fokus pada komunikasi yang dilakukan setiap satu orang tim tersebut. Dan dari komunikasi tersebut kita olah, sehingga setiap kali rapat itu menghasilkan informasi dari calon-calon yang kita dekati.

Sehingga dilakukan penentuan melalui tahap ke 2 yaitu kegiatan internal partai.”

Seleksi ini merupakan tahap kegiatan yang dilakukan di internal Partai Keadilan Sejahtera. Mengumpulkan data-data yang telah terfokus yang dikumpulkan dari setiap tim. Dan akhirnya dilakukan poling dalam internal partai, dimana calon-calon yang cocok dengan platform dan visi misi dari Partai Keadilan Sejahtera itu sendiri. Dari penetapan calon tersebut akhirnya Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Jember menentukan pilihan pada pasangan Sugiarto dan Dr. Dwi. Dari mekanisme tersebut Partai Keadilan Sejahtera Jember menyerahkan semua informasi kepada Partai Keadilan Sejahtera pusat, untuk menentukan keputusan.

Perbandingan Rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap Cabup dan Cawabup pada PILKADA tahun 2015 di Kabupaten Jember.

Pada PILKADA tahun 2015 di Kabupaten Jember, pola rekrutmen cabup cawabup memiliki mekanisme berbeda diantara kedua partai PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera, hal ini dapat dilihat dari pola-pola yang diterapkan dalam proses rekrutmen kedua partai tersebut. Seperti yang dilakukan PDI-Perjuangan yang membuka pendaftaran bagi siapa saja yang mau mencalonkan menjadi Bupati, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera sendiri lebih melakukan komunikasi dan pendekatan kepada calon yang akan diusung, Partai Keadilan Sejahtera tidak membuka pendaftaran melainkan mencari dengan jalan pendekatan dan komunikasi. Seperti yang saya wawancara terhadap ketua Partai Keadilan Sejahtera Jember Bapak Rusdan mengatakan, *”tradisi dari PKS adalah melamar calon bukan dilamar atau juga membuka pendaftaran, karena kalo PKS dilamar atau mereka mendaftar ke PKS, berarti kita ambisi”*, hal tersebut bisa penulis simpulkan, bahwa pola rekrutmen berbeda terjadi karena berhubungan dengan platform atau peraturan dasar-dasar yang telah dibentuk dan disepakati oleh pendahulu partai yang akhirnya menjadi tradisi dari partai. Jika dilihat

dari mekanisme Internal atau peraturan pusat partai terlihat sama, rekrutmen dan pengumpulan informasi tentang calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung dilakukan oleh daerah pada PDI-perjuangan dinamakan DPC (Dewan Perwakilan Cabang) pada Partai Keadilan Sejahtera dinamakan DPW (Dewan Perwakilan Wilayah), yang akhirnya keputusan ditentukan oleh DPP (Dewan Perwakilan Pusat). Pada Partai Keadilan Sejahtera sendiri mengklaim bahwa keputusan penentuan calon Bupati dan Wakil yang akan diusung pada PILKADA 100% suara dari wilayah didengarkan. Lain halnya PDI-Perjuangan DPP memiliki keputusan yang kuat pada DPC.

PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang memiliki massa yang besar di Kabupaten Jember, pada pemilu 2015 kedua partai ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang akan menjadi penentu suksesnya partai kedepannya. Adapun yang menjadi kelebihan dari pola rekrutmen cabup cawabup PDI-Perjuangan adalah, dalam prosesnya partai tersebut terbuka, membuka pendaftaran bagi siapa saja yang akan mencalonkan, partai PDI-Perjuangan melakukan interview calon untuk menyampaikan apa yang menjadi fokus yang akan dikerjakan cabup dan cawabup pada Kabupaten Jember. Sedangkan pada PKS mereka unggul pada cara rekrutmen pendekatan pada individu dari calon-calon, dengan jalan komunikasi yang berlangsung membuat PKS bisa menentukan karakter calon dan kredibilitasnya yang akan diusung. Sedangkan mengenai kekurangan kedua partai tersebut pada PILKADA tahun 2015 pada Kabupaten Jember ini, masih belum adanya calon-calon yang dihadirkan dari rekrutmen tersebut dari kader sendiri, itu artinya ada indikasi perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi antara cabup yang akan diusung kedua partai tersebut dengan partainya. Dan juga menandai tidak berjalannya fungsi kaderisasi di dalam kedua partai tersebut. Dalam hasil penelitian ini, PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera mengatakan bahwa tentang kaderisasi itu butuh waktu yang lama dalam menciptakan figure yang populer serta memiliki elektabilitas dan kredibilitas yang dimunculkan dari

ranting anak cabang sampai menjadi figur kepemimpinan.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas mengenai perbandingan rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera pada cabup dan cawabup PILKADA tahun 2015 Kabupaten Jember, penulis menyimpulkan pola rekrutmen dan perbandingan rekrutmen yang terdapat pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Tahapan pola rekrutmen yang diterapkan pada PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera dimulai dari pembukaan calon yang dilakukan oleh internal PDI-Perjuangan dan seleksi kedua dilakukan tes berdasarkan ketentuan yang telah dibuat pada PDI-Perjuangan, sedangkan pada Partai Keadilan Sejahtera membentuk tim untuk melakukan pendekatan komunikasi pada calon yang di target setelah itu pada tahap ke duanya PKS melakukan seleksi dengan cara mengumpulkan informasi dari pendekatan dan komunikasi sebelumnya yang dilakukan tim pemenang pemilu PKS dan dilakukan poling internal partai.
2. Pola rekrutmen pada PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap cabup dan cawabup pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2015 sangat berbeda. Terlihat dari mekanisme yang diterapkan. Pada PDI-Perjuangan terlihat pada tahap-tahapnya yang membuka pendaftaran sedangkan pada Partai Keadilan Sejahtera tidak dilakukan pendaftaran melainkan dilakukan pendekatan-pendekatan komunikasi sebelumnya.

PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera pada pelaksanaan rekrutmen calon Bupati yang akan diusung pada PILKADA tahun 2015 ini, kedua partai tersebut

juga berbeda dapat dilihat melalui mekanismenya. Pada PDIP mereka membuka pendaftaran sedangkan pada PKS melakukan pendekatan secara internal yang dilakukan oleh partai.

Saran

1. Dalam merekrut cabup dan cawabup baik PDI-Perjuangan maupun Partai Keadilan Sejahtera harus lebih terbuka dalam proses rekrutmen pada cabup dan cawabupnya, walupun dalam prosesnya pada PDIP membuka pendaftaran, tetapi proses penentuan rapat internal masih tertutup dan hanya diketahui oleh beberapa anggota internal partai.
2. Meskipun pada partai PDIP dan PKS lebih mengedepankan kader internal daripada kader eksternal, kedua partai tersebut harus mempertimbangkan bahwa kualitas dari cabup dan cawabup yang diusung melalui proses rekrutmen benar-benar figur yang memiliki kualitas yang akan melaksanakan tugasnya untuk memajukan Kabupaten Jember.
3. PDIP dan PKS harus lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pola rekrutmen cabup dan cawabup pada PILKADA Kabupaten Jember yang akan datang agar dapat menghadirkan cabup dan cawabup yang lebih berkualitas.
4. Sebagai partai politik PDIP dan PKS harus lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada peneliti tentang pola rekrutmen yang dilakukan internal partai sehingga peneliti dapat benar-benar membandingkan pola rekrutmen yang sebenarnya pada internal, hal ini ditujukan pada peneliti sebagai perbandingan penelitian yang sejenis berikutnya.

Daftar Pustaka

BUKU

- Budiardjo, Miriam, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Gramedia

Pustaka Utama,

Jakarta

- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2013, *Pengantar Sosiologi Politik*, Prenada

Media Group,

Jakarta

- Sigit.Pamungkas.2011. *Partai Politik dan Praktek di Indonesia*, Institute For

Democracy and Welfarism,

Yogjakarta

- P. Huntington, Samuel dan Nelson. 2005, *Partisipasi Politik di Negara*

Berkembang, RinekaCipta

Jakarta

- Hadi Sutrisno. 2002, *Metodologi Research*, Andi Offset,

Yogyakarta

- Marijan.Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Pasca Demokrasi*

Orde Baru, Prenada Media Group

Jakarta

- Kartini Kartono, 1990, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju,

Bandung

- Irawan Prasetya, 2006, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu*

Sosial, Fisip Universitas Indonesia

Jakarta

AD-ART PDI-perjuangan

AD-ART Partai Keadilan Sejahtera

INTERNET

<http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/09/Irawati>

[%20\(09-27-16-10-28-43\).pdf diakses pada 23-12-2016 pukul 21;21 wib](#)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember

[https://pilkada.metrotvnews.com/news-pilkada/MkMI35Db-pdip-klaim-akan-](https://pilkada.metrotvnews.com/news-pilkada/MkMI35Db-pdip-klaim-akan-menangkan-15-pilkada-di-jawa-timur)

[menangkan-15-pilkada-di-jawa-timur](#)

<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/12/16291511/Sohibul.Iman.Kemenangan.PKS.dalam.Pilkada.2015.Melebihi.Target>